

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK *PESANGGEM* DALAM
KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS DI PETAK 104
KABUPATEN BLORA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum*

OLEH:

FALIH AIRA VISTA

2210113194

Program Kekhususan: Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Amelia Zulfitri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas		Falih Aira Vista		No. Alumni Fakultas	
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Rembang/ 11 Juni 2004	f. Tanggal Lulus	: 21 April 2026		
b. Nama Orangtua	: Bambang Sugiarto, Indah Sugiyarti	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian			
c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 8 Bulan			
d. PK	: Hukum Agraria dan SDA	i. IPK	: 3,86			
e. No. BP	: 2210113194	j. Alamat	: Perumahan Perhutani Pandean No. 11, Rembang			

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PESANGGEM DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS DI PETAK 104 KABUPATEN BLORA


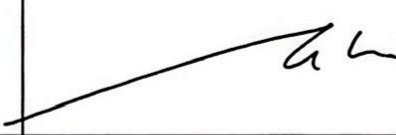

(Falih Aira Vista, 2210113194, Hukum Agraria dan SDA, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 129 Hlm, 2026)

ABSTRAK

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai skema lanjutan dari program Perhutanan sosial menyebabkan hampir separuh lahan yang dikelola Perhutani beralih fungsi dan pengelolaannya kembali kepada Pemerintah Pusat. Hal ini mengakibatkan *Pesanggem* sebagai masyarakat petani yang menggarap lahan milik Perhutani menjadi kehilangan kepastian dan perlindungan hukum dalam menggarap lahan. Perhutani KPH Mantingan dan *Pesanggem* Desa Nglangitan yang memiliki hubungan kemitraan tentunya juga terdampak KHDPK, khususnya terkait dengan perlindungan atas hak garap Petak 104 yang berada di Kabupaten Blora. Padahal Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme seorang petani dapat menjadi *Pesanggem* di Desa Nglangitan Kabupaten Blora?. 2) Bagaimana proses perubahan status kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)?. 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak *Pesanggem* yang menggarap Petak 104 Kabupaten Blora dengan adanya Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (*Socio legal approach*). Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan teknik *Sampling Snowball*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Di Desa Nglangitan tidak ada mekanisme khusus untuk menjadi *Pesanggem*. Semua orang yang memiliki kepedulian terhadap sumber daya hutan dan bersedia merawat tanaman tegakan Perhutani dapat menjadi *Pesanggem* 2) Ketidakjelasan pemanfaatan dan tindak lanjut dari alih fungsi kawasan hutan Perum Perhutani KPH Mantingan menjadi KHDPK, khususnya di Petak 104B sebagai salah satu kawasan yang menjadi KHDPK mengakibatkan munculnya konflik sosial di masyarakat. 3) Kurangnya arahan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat menyebabkan dinas kehutanan daerah terkait menjadi kurang berkoordinasi dan saling melempar kewajiban terkait perlindungan hak *Pesanggem* karena KHDPK bukan ranah dan kewenangan mereka. Hal ini menyebabkan *Pesanggem* menjadi tidak memiliki kepastian hukum akan haknya atas lahan Petak 104B maupun dalam kegiatan penggarapan lahan KHDPK, karena statusnya sebagai masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Pesanggem*, Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 21 April 2026.
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Falih Aira Vista	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H	Darnis, S.H., M.H


Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Falih Aira Vista	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date Of Birth : Rembang/ 11 st June 2004	f. Graduation Date : 21 st April 2026	
b. Parent's Name : Bambang Sugiarto, Indah Sugiyarti	g. Pass Predicate : With Honours		
c. Faculty : Law	h. Length of Study : 3 Years 8 Month		
d. Concentration : Agrarian Law and Natural Resources	i. GPA : 3,86		
e. Student ID : 2210113194	j. Address : Perumahan Perhutani Pandean No. 11, Rembang		

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF PESANGGEM IN FOREST AREAS WITH SPECIAL MANAGEMENT IN PARTS 104 BLORA DISTRICT




(Falih Aira Vista, 2210113194, Agrarian Law and Natural Resources, Faculty of Law, Andalas University, Page 129, 2026)

ABSTRACT

Forest Area with Special Management (KHDPK) as a continuation scheme of the social forestry program has caused almost half of the land managed by Perhutani to change function and its management has returned to the Central Government. This has resulted in Pesanggem as a farming community that cultivates land owned by Perhutani to lose certainty and legal protection in cultivating the land. Perhutani KPH Mantingan and Pesanggem Nglangitan Village which have a partnership relationship are certainly also affected by KHDPK, especially related to the protection of cultivation rights for Plot 104 located in Blora Regency. Whereas Article 4 Paragraph (1) of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry states that the community has the right to manage and utilize forest products to meet their living needs. The problems that will be discussed in this study are: 1) What is the mechanism for a farmer to become Pesanggem in Nglangitan Village, Blora Regency? 2) How is the process of changing the status of the forest area managed by Perum Perhutani KPH Mantingan to become a Forest Area with Special Management (KHDPK)? 3) How is the legal protection of the rights of Pesanggem who cultivate Plot 104 of Blora Regency with the existence of Forest Areas with Special Management (KHDPK)? The type of research used in this writing is empirical juridical research with a sociological juridical approach method (Socio legal approach). Data collection in the study used semi-structured interviews with the Snowball Sampling technique. From the results of the study it can be concluded that: 1) In Nglangitan Village there is no special mechanism to become Pesanggem. Everyone who has concern for forest resources and is willing to care for Perhutani's standing plants can become Pesanggem 2) The unclear utilization and follow-up of the conversion of Perum Perhutani KPH Mantingan forest area into KHDPK, especially in Plot 104B as one of the areas that became KHDPK resulted in the emergence of social conflicts in the community. 3) The lack of direction and follow-up from the central government caused the relevant regional forestry services to be less coordinated and shifting obligations regarding the protection of Pesanggem rights because KHDPK is not their domain and authority. This causes Pesanggem to have no legal certainty regarding its rights to the Plot 104B land or in the KHDPK land cultivation activities, due to its status as a community living in a forest area.

Keywords: Legal Protection, Pesanggem, Forest Areas with Special Management (KHDPK)

This thesis has been defended in front of the Examination Team and was declared passed on April 21st, 2026. Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Falih Aira Vista	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H	Darnis, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/ University Officer	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: